

ABSTRAK

PEMENUHAN HAK MASYARAKAT TERHADAP KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

ANNISA DEWI KUSUMA

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ideal harus memenuhi proporsi paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, dengan 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Namun, ketersediaan RTH di Bandar Lampung saat ini sangat rendah yaitu sekitar 4,5% yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyediaan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pemenuhan hak masyarakat terhadap ketersediaan RTH di Kota Bandar Lampung? (2) Apa sajakah faktor yang menyebabkan RTH di Kota Bandar Lampung tidak terpenuhi? Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui studi kepustakaan. Kemudian untuk mengetahui keadaan faktual di lapangan maka dilakukan penelitian empiris melalui wawancara terhadap narasumber selaku pelaksana pemeliharaan lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pemenuhan hak masyarakat terhadap RTH di Kota Bandar Lampung belum terpenuhi. RTH telah diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 hingga Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2023 yang dimana harus terpenuhi paling sedikit 30%, namun implementasinya terkendala karena lemahnya pengawasan juga akibat kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan fleksibilitas dalam penyediaan RTH. RTH yang tersedia hanya sekitar 4,5% ini berdampak pada berkurangnya resapan air, menurunnya kualitas lingkungan, dan kurangnya ruang publik. Upaya pemerintah dalam regulasi, perencanaan, dan koordinasi sektor terkait juga belum optimal. (2) Faktor-faktor yang menghambat ketersediaan RTH yaitu Pemerintah Kota Bandar Lampung kurang memperhatikan penyediaan RTH akibat pesatnya pembangunan, alih fungsi lahan, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH serta sulitnya mendapat alokasi anggaran untuk RTH.

Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Pemenuhan Hak, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

FULFILLMENT OF COMMUNITY RIGHTS TO THE AVAILABILITY OF GREEN OPEN SPACE IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG

BY

ANNISA DEWI KUSUMA

The ideal Green Open Space (GOS) should fulfil a minimum proportion of 30% of the city area, with 20% for public RTH and 10% for private RTH. However, the availability of green open space in Bandar Lampung is currently very low at around 4.7% which is contrary to the Bandar Lampung City Regional Regulation Number 14 of 2023 concerning the Provision and Management of Green Open Space.

The problems in this research are: (1) How is the fulfilment of community rights to the availability of green open space in Bandar Lampung City? (2) What are the factors that cause green open space in Bandar Lampung City not to be fulfilled? The method used is normative legal research method with statutory approach through literature study. Then to find out the factual situation in the field, empirical research was conducted through interviews with resource persons as implementers of environmental maintenance at the Bandar Lampung City Environmental Service.

The results of this study show: (1) Fulfilment of community rights to green spaces in Bandar Lampung City has not been fulfilled. Green spaces has been regulated in various regulations such as Law Number 26 of 2007 to Bandar Lampung City Regional Regulation Number 14 of 2023 which must be fulfilled at least 30%, but its implementation is constrained due to weak supervision as well as policies such as the Job Creation Law which provides flexibility in the provision of RTH. The available green spaces is only around 4.5%, which has an impact on reduced water infiltration, decreased environmental quality, and lack of public space. Government efforts in regulation, planning, and coordination of related sectors have also not been optimal. (2) Factors that hinder the availability of green spaces are the Bandar Lampung City Government's lack of attention to the provision of green spaces due to rapid development, land conversion, and lack of public awareness of the importance of green spaces as well as the difficulty of obtaining budget allocations for green spaces.

Keywords: Green Open Space, Rights Fulfillment, Local Government